LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : /KEP / / 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 - 2018

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara Pusat dengan Daerah, Daerah dengan Daerah dan juga antar instansi dan fungsi Pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD(Renja-OPD), sebagai acuan dan pegangan bagi Pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka eksistensi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang leading sektor “Pembangunan Bidang Sosial berupaya untuk melaksanakan program sesuai kebutuhan daerah”.

Isu penting dalam penyelenggaraan Pembangunan dalam Bidang Sosial lima tahun kedepan di daerah ini dapat direfleksi dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Enrekang yaitu Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera ( EMAS ) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Enrekang 5 tahun kedepan mempunyai visi sebagai tindak lanjut dari visi Kabupaten Enrekang adalah Terwujudnya Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Lebih Mapan Secara Ekonomi Maupun Sosial Menuju Enrekang Maju, Aman Dan Sejahtera.

Dalam rangka pencapaian rencana jangka panjang sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Pencapaian Tujuan dengan melalui kebijakan Program dengan tetap memperhitungkan potensi dan kendala serta mengantisitipasi tuntutan perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Enrekang adalah sebuah dokumen tehnis opersional yang merupakan pedoman penyusunan perogram kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor sosial, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2014-2018. Oleh karenanya agar pembangunan daerah dapat terarah dan berkesinambungan maka diperlukan adanya suatu perencanaan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam penusunan rencana/program kerja.

* 1. Landasan Hukum

Landasan idil Penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyesuaian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteran social ( Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri social Nomor 29/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi Daerahdan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republikl Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
    1. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 dimaksudkan untuks menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sektor sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan :

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Enrekang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014 - 2018;

2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2014 - 2018;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Enrekang (Rencana Kerja Tahunan);

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Sosial Kab. Enrekang baik tahunan maupun lima tahunan.

5. Sebagai rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Enrekang.

* 1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis OPD Dinas Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **PENDAHULUAN**
   1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

* 1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

* 1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

1. **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

* 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

* 1. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

* 1. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

* 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1. **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** 
   1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan OPD)

* 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

* 1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

* 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi .

* 1. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

1. **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
   1. Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD.

* 1. Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,

1. **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BABA VII PENUTUP

Hubungan Renstra OPD Dinas Sosial Kabupaten Enrekang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN ENREKANG

* 1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Enrekang, maka Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, maka Dinas Sosial Kabupaten Enrekang adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang.

* + - 1. **Kepala Dinas**

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, menyusun, menkordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Sosial .

Dalam menyelenggarkan tugas sebagaimana di maksud diatas maka kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Dinas ;
2. Penyusunan rencana stratejik dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial ;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas ; dan
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Dinas Sosial.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; dan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Sekretaris membawahi :

* 1. Kasubag Perencanaan;
  2. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
  3. Kasubag Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

1. Kasubag Perencanan

1) Sub Bagian Perencanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan Dinas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b.  Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c.  Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan.

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian

1) Subag Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b.  Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c.  Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kasubag Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan secara berkala.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b.  Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c.  Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Keuangan; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Staf dalam lingkup Sub Bagian Keuangan.

**4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. Penyelenggaraan Program dan kegiatan bidang;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
3. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial**

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan seksi dalam lingkup seksi Pemberdayaan Bantuan Sosial.

**2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang Jaminan Sosial Keluarga**.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf dalam lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi Jaminan Sosial Keluarga.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala Kepala seksi di lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Sosial,

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;

b.   Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c.   Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Anak, penayndang disabilitas dan

Rehabilitasi sosial Lanjut Usia

1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial korban perdagangan orang dan penyalagunaan Napza
2. **Seksi Rehabilitasi Anak, penyandang disabilitas dan**

**Rehabilitasi sosial Lanjut Usia**

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelapa seksi mempunyai fungsi :

* 1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi.
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Seksi dalam lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ;

1. **Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial korban perdagangan orang dan penyalagunaan Napza**

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan orang dan Penyalagunaan NAPZA dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan orang dan Penyalagunaan NAPZA.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

* 1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi.
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.
  3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan orang dan Penyalagunaan NAPZA.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

* 1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang;
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dalam lingkup Bidang Pemberdayan Sosial.
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

* + 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
    2. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
    3. **Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai Tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi mempunyai fungsi :

* 1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi;
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
     1. **Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh kepala Seksi**

Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

* 1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi;
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Informasi Data

1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas ; membina dan mengkoordinis kepala kepala Seksi di lengkup Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Informasi Data

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang;

1. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala Seksi dalam lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Informasi Data.
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Informasi Data.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Informasi Data. membawahi :

* + 1. Seksi Penganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan;
    2. Seksi Pengelolaan Informasi Data

1. **Seksi Penganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan**

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan

dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai Tugas melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan di Bidang Penangan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan.
4. Pelaksanaan evaluasi progam dam kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan.

2. Seksi Pengelolaan Informasi Data

Seksi Pengelolaan Informasi Data dipimpin oleh kepala Seksi, mempunyai tugas melaksankan pembinaan dan bimbingan di Seksi Pengelolaan Informasi dan Data

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunanan program dan kegiatan Seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Data;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Staf dalam lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Data;

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagaian Tugas Dinas Sosia sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya dari Struktur Organisasi Dinas sosial Kabupaten Enrekang maka dapat dilihat pada bagan lampiran

C. Jabatan Sturuktural Organisasi

Jabatan Struktural terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekreatriat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas Dan

Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

2. Seksi Rehabilitasi Tuna sosial Korban Perdagangan Orang Penyalugunaan NAPZA.

e. Bidang Perberdayaan Sosial

1. Seksi Perberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

2. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pengelolaan Informasi Data.

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan

2. Seksi Pengelolaan Informasi Data

Susunan organisasi dan Tata Kerja OPD Dinas Sosial Kabupaten Enrekang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan susunan organisasi disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

*Gambar. 2.1*

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAG.

PERENCANAAN

SUB BAG.UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAG.

KEUANGAN

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN INFORMASI

Seksi Perlindumgan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pedesaan

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

ESELON IV A

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitasdan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Program

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Anak dan Penyalahgunaan NAPZA

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

SPI

* 1. **Sumber Daya OPD Dinas Sosial Kabupaten Enrekang**

1. **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung terlaksannya tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Enrekang maka harus ditunjang dengan tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan profesional.

Secara umum SDM Dinas Sosial kabupaten Enrekang belum sesuai standar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang sebagaimana Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Enrekang memiliki sumberdaya Aparatur sampai pada keadaan Januari 2017 berjumlah 24 orang sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 2.1

Keadaan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kab.Enrekang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PANGKAT/GOLONGAN | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | Pembina Utama Muda, IV/c  Pembina Tk. I, IV/b  Pembina, IV/a  Penata Tk.I, III/d  Penata, III/c  Penata Muda Tk.I, III/b  Penata Muda, III/a  Pengatur, II/d  Pengatur, II/c  Pengatur Muda Tk. I, II/b  Pengatur Muda, II/a | 2  1  1  5  1  1  2  -  -  1  - | -  -  1  5  1  -  2  1  -  -  - | 2  1  2  10  2  1  4  1  -  1  - |

Selain pejabat sturuktural pada tabel di atas juga dibantu beberapa staf tenaga kontrak/ tenaga sukarela sebanyak 13 orang dan Tenaga pekerja ( Pembersih ) TMP/TMB 2 org

Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. Enrekang dengan nomor Telepon (0420) 21 060 dan Nomor Fax (0420) 22149 serta Kode Pos 91712

Adapun keadaan Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Enrekang berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah.

Tabel 2.2 Keadaan Aparatur Dinas Sosial Kab Enrekang berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Tahun 2017

Tabel 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Pendidikan | Struktural | Jumlah |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Pasca Sarjana (S-2)  Sarjana (S-1)  Sarjana Muda / (D3)  SLTA  SLTP  SD | 2  18  1  3  -  - | 2  18  1  3  -  - |

1. **Sarana dan Prasarana**

Asset Pemerintah Kabupaten Enrekang yang pemanfaatannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang antara lain yang dapat diinformasikan.

Rincian asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial berdasarkan data sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3

Asset Dinas Sosial Kabupaten Enrekang berdasarkan data Tahun sampai dengan Desember 2013

Tabel 2.3

Daftar Peralatan pendukung Operasional

Sampai bulan Januari 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Barang | Jumlah | Kondisi | | | Ket. |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak  Berat |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 | Tanah B. Kantor  Bag. Kantor  Perkampungan  Tanah Lap. Parkir  Sepeda Motor Astrea  Sepeda Motor Suzuki RC  Sepeda Motor Honda Win  Sepada Motor Yamaha Jupiter  Sepeda Motor Yamaha Vega  Sepada Motor Soul GT (Matic)  Rubber Boat Yamaha  Meja 1 Biro  Stavolt  AC Split 1 Pk  Brankas  Lemari Es  Tempat Tidur Kayu  Wireless  Tabung Gas  Note Book  Meja ½ Biro  Laptop  Handycam  Proyektor Ben Q  Mesin Fax Panasonic  Sepeda Motor Honda Revo  Laptop Toshiba  Sepada Motor Suzuki Titan  Sepeda Motor Suzuki NEX  Mesin Ketik Brother  Kipas Angin Tornado  AC Samsung 1 Pk  Komputer PC  Note Book Acer  AC 1 Pk  Komputer  Komputer PC Lenovo  Komputer Server  Laptop Acer  Printer Canon  Printer Canon 1x6560  Meja ½ Biro Volta DOC  Meja 1 Biro Jati Asli  Sepada Motor Yamaha Soul GT  Lemari Arsip Star  Filling Kabinet  Penunjuk Waktu  AC LG  Meja Pimpinan  Meja Kerja  Meja Kerja Frontline  Kursi Rapat Napolly  Dispenser Miyako  Mesin Pemotong Rumput  Penyemprot Racun Robotech  Printer Epson L220  Almari Kayu  Filling Kabinet Riel&Rick 2 Pintu  Almari TV Napolly  Air Conditoner Samsung 1 Pk  Televisi Sharp 32 Inch  Mesin Tik Olivetti  Kursi Staf Fronline  Rak Buku LHS 6030  Kursi Tamu (Sofa Labella)  Kursi Kerja Staf Zepelin  Meja Komputer Hazel  KursiTamu Consil689  Lemari Arsip GlassFilling  Meja Direktur  Meja Direktur Besar  Meja Biro HS1404  Meja Rapat  Kursi Kerja Zuan  Meja ½ Biro MC100445695  Kursi Direktur Presiden931  Rak Buku Boxel | 1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  2 Unit  2 Unit  2 Unit  1 Unit  3 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  3 Unit  1 Unit  6 Unit  1 Unit  2 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  3 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  3 Unit  3 Unit  3 Unit  1 Unit  1 Unit  1 Unit  2 Unit  8 Unit  1 Unit  1 Unit  42 Unit  42 Unit  8 Unit  2 Unit  1 Unit  1 Unit  4 Unit  1 Unit  12 Unit  12 Unit  6 Unit  5 Unit | Baik  Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik | RR  RR  - |  |  |

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana kedinasan berperan penting dalam menunjang kelancaran dan mobilitas kerja, khususnya yang bersifat antar lokasi. Hingga bulan Januari 2017 ada 3 unit kendaraan dinas roda empat serta 8 unit kendaraan roda dua. Sebagian besar kendaraan tersebut berada pada Kantor Dinas Sosial dan sebagian lainnya digunakan untuk menunjang kegiatan Sosial

( bantuan bencana ).

Dukungan sarana kerja di lingkungan Dinas Sosial antara lain ditunjukkan pula dengan keberadaan perangkat komputer 4 unit,laptop 7 unit dan printer 7 unit yang hingga tahun 2017. Meskipun demikian, peremajaan beberapa sarana kerja tersebut masih diperlukan, karena beberapa unit komputer dan printer dalam kondisi rusak.

* 1. **Kinerja Pelayanan Dinas Sosial** 
     1. **Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Pelaksanaan penerapan SPM untuk Dinas Sosial dalam bidang SPM yakni Sosial. Selanjutnya untuk melaksanakan SPM tersebut masing - masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2016, yaitu pelaksanaan program dibidang sosial ada 4 jenis pelayanan dan 7 indikator dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial

a. Pemberian bantuan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social skala kabupaten/kota :

1. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 80 %
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social skala kabupaten/kota
3. Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program permberdayaan soisal melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 80 %
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
   1. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupten/kota
5. Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 80 %
   1. Penyedian sarana prasarana luar panti skala kabupaten/kota
6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ( WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 60%
7. Penanggulangan korban bencana
   1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota
8. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 80 %
   1. Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota
9. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana parasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 80 %

4. Pelaksanan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

-. Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten

1. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social pada tahun 2008 – 2015 ditargetkan mencapai 40 %

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Sosial dalam indikator kinerja program, akan dituangkan kedalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial .

* + 1. Pelaksanaan Millenium Development Goals (MDG’s)

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi di dunia internasional. Pada hakekatnya kondisi terakhir dunia lebih banyak ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup*, dengan berlandaskan pada kondisi tersebut, maka pada tahun telah dicapai kesepakatan yang dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG’s)*.

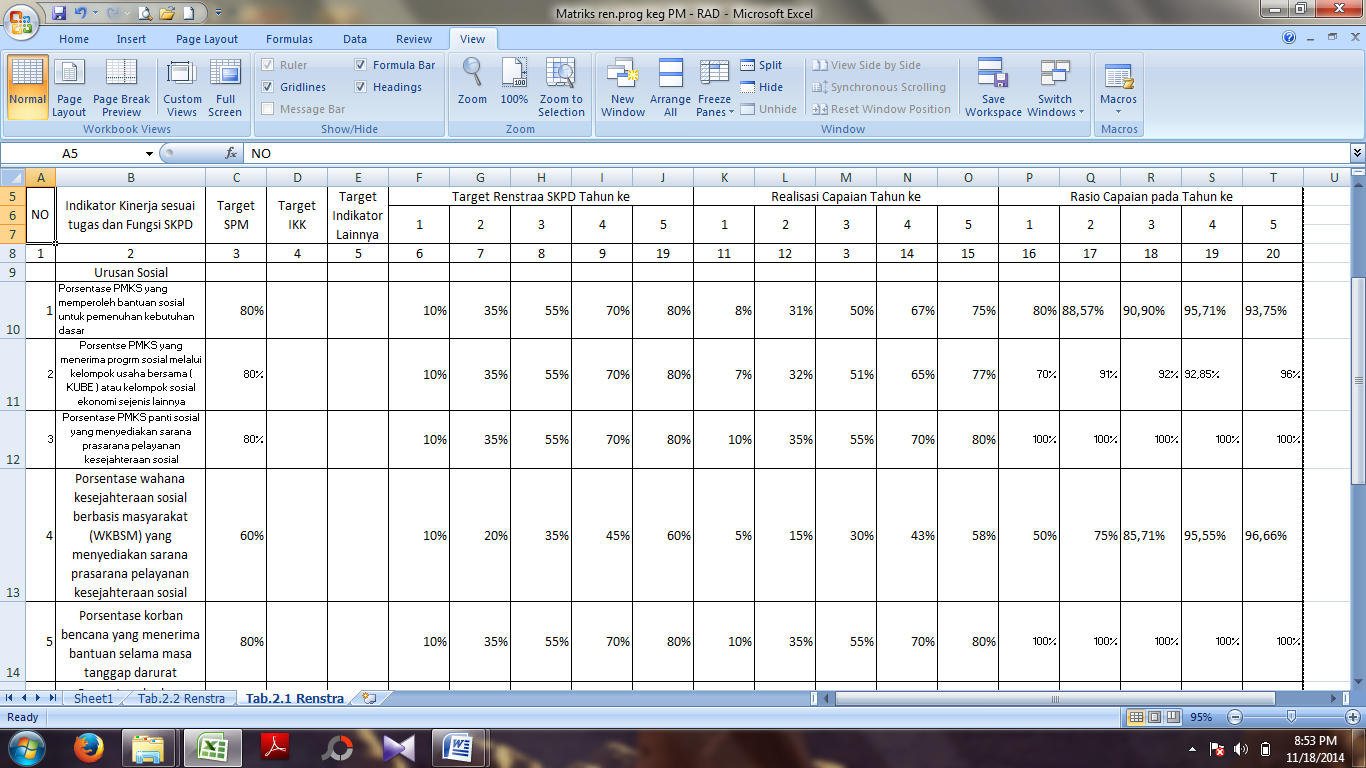
*Millenium Development Goals (MDG’s)* merupakan komitmen internasional dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya MDG’s, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, *MDG’s* mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam *MDG’s.* Oleh karena itu, *MDG’s* menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial

Kabupaten Enrekang





Dari segi cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas jumlah penangaanan PMKS tahun 2009 -2013 masih tergolong belum masksimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah kemampuan keuangan daerah dan merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

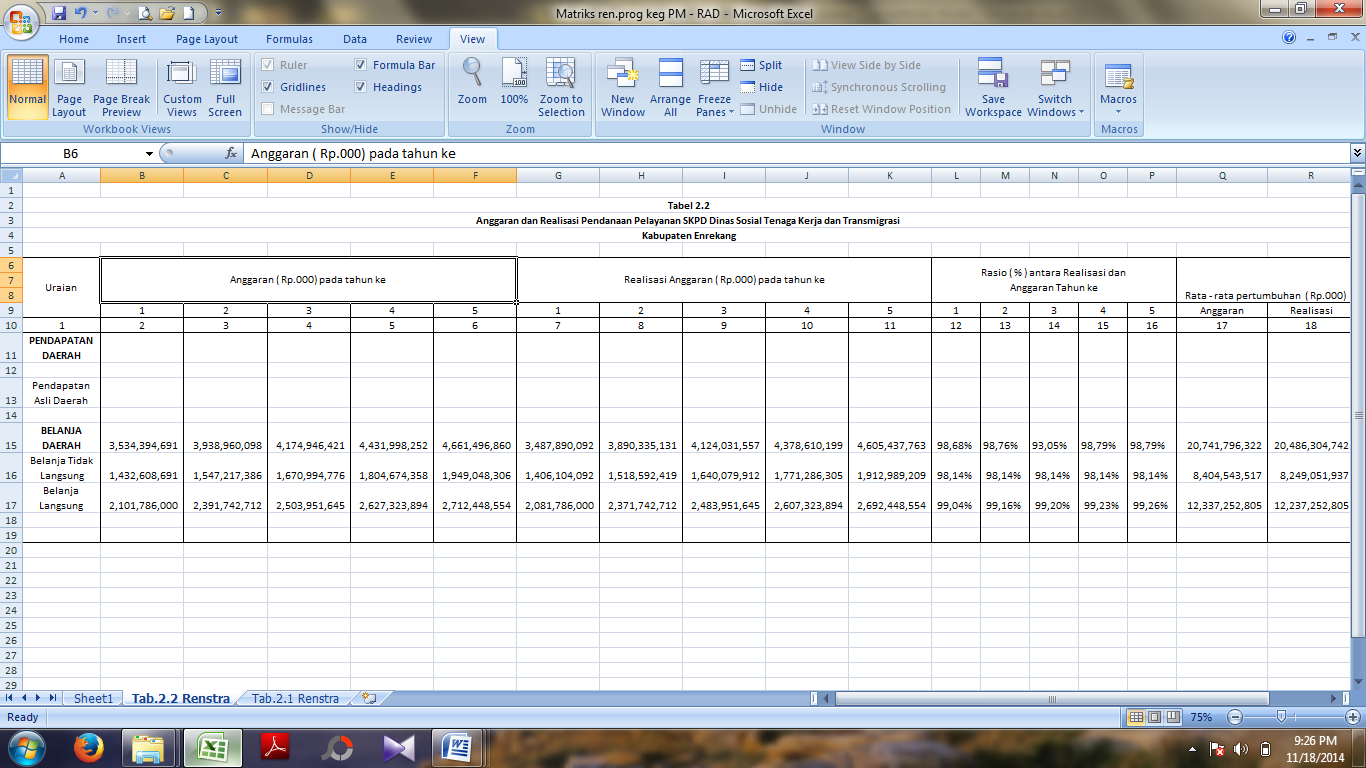
Hal tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kualitas pelayanan Kesejahteraan Sosial. Rendahnya kemampuan pemerintah pusat dan daerah serta sumber pembiayaan lainnya dalam merealisasi permohonan bantuan yang diajukan, berdampak buruk pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan yang sangat urgen seperti ketidakmampuan Dinas Sosial untuk menyiapkan bahan kebutuhan PMKS serta pemenuhan sarana / prasarana lainnya. Kondisi tersebut menjadikan posisi Dinas Sosial berada pada titik yang dilematis. Disatu sisi masyarakat dan pemangku kebijakan selalu menuntut pelayanan yang terjangkau dan berkualitas , tapi disisi lain alokasi anggaran dan realisasi bantuan yang diajukan pihak Dinas Sosial masih rendah.

Secara umum gambaran kinerja keuangan Dinas Sosial akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Enrekang



Kemampua Dinas Sosial Kabupaten Enrekang untuk membiayai kegiatan program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah sebagai daerah otonom. Berkaitan dengan hal ini, maka kapasitas fiskal Kabupaten Enrekang akan sangat menentukan keberhasilan.

Tabel 2.2 tersebut diatas juga menggambarkan bahwa pertumbuhan rata rata belanja tidak langsung pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp. 76,161,343. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji PNS setiap tahun dan bertambahnya jumlah PNS di Dinas Sosial.

Pada belanja langsung justru terjadi penurunan alokasi anggaran dari tahun 2009 s.d 2013. Hal ini sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan dimana pada tahun 2009 s/d Nopember 2011 Dinas sosial masih bergabung dengan Kependudukan dan Catatan Sipil dimana anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.604.378.000,-sedangkan anggaran pada tahun 2013 sebanyak Rp. 1.200.000.000,- kualitas pelayanan di Dinas Sosial mengingat kebutuhan pembiayaan operasional justru semakin meningkat setiap tahun. Dampak dari adanya penurunan tersebut adalah kualitas pelayanan di Dinas Sosial tidak maksimal yang ditandai dengan terbatasnya stok bantuan dan rendahnya biaya operasional rutin lainnya seperti biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Sosial.

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Saat iniDinas Sosial dihadapkan pada tuntutan peningkatan pelayanan publik pada pelayanan kesejahteraan Sosial di Indonesia, hal ini menjadikan Dinas Sosial sebagai bagian dari institusi publik yang memberikan pelayanan. Kesejahteraan Sosial langsung kepada masyarakat untuk lebih professional dan terbuka menghadapi globalisasi.

Selain itu pentingnya peningkatan atas kualitas pelayanan, Kesejahteraan Sosial para staf dan pendukungnya serta infrastruktur Dinsosnakertrans itu sendiri. Dinas Sosial juga harus memiliki jiwa “sosial” yang handal dalam memajukan pelayanan kesejahteraan social tenaga kerja dan trasnmigrasi pada masing-masing tempat dimana staf bekerja.

Dengan demikian, kedepan Dinas Sosial dituntut untuk memberikan perhatian yang cukup serirus terhadap prinsip equiti, efesiensi, efektivitas, kualitas pelayanan dan kepuasaan pelayanan baik internal maupun eksternal.

1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD

Analisis Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) perlu dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sosial.

Sebagai perbandingan maka akan dilakukan review antara indikator kinerja dan capaian sasaran Renstra serta sasaran renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra K/L sebagaimana akan disajikan dalam tebel berikut :

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota

terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota | Sasaran pada Renstra OPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Porsentase Fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan | 35 % | 45 % | 57 % |
| 2 | Porsentase PMKS yang mendapat pelayanan/Rehabilitasi kesos | 50 % | 55 % | 75 % |
| 3 | Porsentase anak terlantar yang mendapat pembinaan | 30 % | 30 % | 40 % |
| 4 | Porsentase Penyandang cacat yang mendapat program social | 30 % | 35 % | 50 % |
| 5 | Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang terbina | 6 Panti | 6 Panti | 6 Panti |
| 6 | Porsentase eks.penyandang masalah social yang mendapat pembinaan kesos | 40 % | 30 % | 20 % |
| 7 | Porsentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | Porsentase bantuan dan jaminan social | 55 % | 45 % | 70 % |
| 9 | Porsentase pembinaan sumbangaan dan bantuan social | 30 % | 0 | 0 |
| 10 | Porsentase Tenaga kerja yang mendapat pembinaan | 60 % | 75 % | 75 % |

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa indikator pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Sosial pada indikator jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial belum mencapai sasaran dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L. Namun masih ada indikator yang belum mencapai sasaran yaitu alokasi pembiayaan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerapan SPM disemua Pelayanan Dinsosnakertrans (40-80%) standarisasi sarana dan prasarana (60%), tingkat kompetensi aparatur sesuai tupoksi (75%) .

Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pihak Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan. Kondisi tersebut juga perlu menjadi bahan masukan kepada Dinas Sosial dan pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan lagi upaya penanganan PMKS dan pengurangan pengangguran.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara konprehensif, sehingga terjadi suatu sinergi antara pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam penanganan PMKS. Oleh karena itu pembangunan kesosnakertrans merupakan agenda wajib dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi yang ingin dicapai dan proyeksi kedepan dalam bidang kesosnakertrans khususnya di Dinas Sosial adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan Kesos kepada publik melalui Bantuan dan jaminan kesosnakertrans yang optimal.
2. Meningkatnya fungsi Staf, TKSK,PSM,TAGANA dan TKS melalui pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan managemen dan SDM, pemenuhan sarana, prasarana, Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB III

ISU-ISU

STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelayanan Kesos di Dinas Sosial, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan strategis antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Sosial senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi

yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program dan kegiatan SKPD harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Beberapa permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran-sasaran pokok Rencana Strategis OPD pada periode pelaksanaan Tahun 2014-2018, diuraikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya penyandang masalah kesejhteraan sosiaal (PMKS)
2. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum maksimal
3. Belum optimalnya peran kelembagaan-kelembagaan sosial di masyarakat ( Karang Taruna, TKSK dan PSM

Hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Sosial selengkapnya akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 3.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Enrekang

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAL  (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL  (DILUAR KEWENANGAN SKPD) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kinerja Pelayanan OPD Dinas social Kab.Enrekag | Indikator Pelayanan Kesos di Dinsos belum optimal | * SPM(40-80%) | * Pelayanan belum optimal * Kualitas Sarana dan prasarana Dinsos masih rendah * Kebutuhan PMKS belum maksimal * Penerapan dan evaluasi SPM belum maksimal | * Tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap pemenuhan sarana dan kualitas pelayanan kesos semakin tinggi * Letak geografis tidak mendukung pelaksanaan kegiatan | * Pelayanan Kesos belum maksimal |
| Kajian terhadap Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota, Kajian terhadap Renstra K/L | * Porsentase Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Jumlah PMKS yang memperolah bantuan dlm 1 thn X 100 % | * Data belum akurat dan belum optimalnya bantuan terhadap PMKS | * Data yang akurat dan dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | * Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| Jumlah PMKS dlm 1 thn yang seharusnya memperolah bantuan |
| Porsentase PMKS yang menerima program social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok usaha social lainnya | Jumlah PMKS yang menerima program social melalui kelompok usaha bersama(KUBE) atau kelompok usaha lainnya bantuan dlm 1 thn X 100 % | * Data belum akurat dan belum optimalnya bantuan terhadap PMKS | * Data yang akurat dan dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | * Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| Jumlah PMKS dalam 1 thn yang menerima program social melalui kelompok usaha bersama(KUBE) atau kelompok usaha lainnya bantuan dlm |
| Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat | Jml korban bencana dlm 1 thn yang menerima bantuan sosil selama masa tanggap darurat X 100 % | * Tersedianya baperstok untuk tanggap darurat | * Sarana dan prasarana belum maksimal * dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| Jml korbaan bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat |
| Porsentase korban bencana yang dievakuasi dgn menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Jumlah korban bencana yang dievkuasi dgn menggunakan sarana prasarana tanggap darurat llengkap x 100 % | * Sarana prasarana tanggap darurat lengkap belum maksimal | * Sarana dan prasarana belum maksimal   Dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II S | * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana ltanggap darurat llengkap |
| Porsentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima bantuan social | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosiak dalam 1 thn x 100 % | * Bantuan jaminan social bagi cacat fisik dn mental belum optimal | * Sarana dan prasarana belum maksimal * Dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | * Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang seharusnya menerima jaminan social |
|  | Porsentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana | Jumlah panti social dalam 1 thn yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social x 100 % | * Penyediaan sarana prasarana panti belum optima ( jumlah panti 6 ) | * Sarana dan prasarana belum maksimal * dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | * Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal |
| jJumlah panti social dalam 1 thn yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social |
|  | Porsentase wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat ( WKBSM ) yang menyediakan sarana prsarana pelayanan kesejahteraan social | Jumlah WKBSM dlm 1 thn yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social x 100 % | * Belum ada sarana prasarana WKBSM | * Sarana dan prasarana belum maksimal * dukungan bantuan dana baik dari APBN, APBD I dan APBD II | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social belum maksimal   * Belum optimaalnya peran kelembagaan – kelembagaan social di masyarakat (Karang Taruna, TKSK dan PSM |
| Jumlah WKBSM dlm 1 thn yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos |
|  | | | | | | |

* 1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan disajikan dalam tabel 3.1 berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi:  “Terwujudnya Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS)”Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan | | | | |
| No | Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  | MISI IV : Meningkatnya perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis agribisnis dan Agroindustri |  |  |  |
|  | * Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil | Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | * Pelayanan dan pembiayaan belum optimal * Masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan , baik karena isolasi alam maupun isolasi budaya. | * Terbentuknya kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Uaha Ekonomi Produktif (UEP) Bersama * Tingginya minat masyarakat berusaha untuk kelangsungan hidupnya * Terbangunnya pemukiman warga Komunitas Adat Terpencil |
|  | * Program Pelayanan dan Rehabilitsi Kesejahteraan Sosial | * Penanganan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum maksimal | * Pelayanan dan pembiayaan belum optimal | * Adanya Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |
|  | * Program Pembinaan Anak Terlantar | * Sarana dan prasarana pembinaan belum maksimal * Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak/kebutuhan tumbuh kembang anak | * Alokasi Anggaran pengadaan sarana dan prasarana dari APBD masih terbatas * Pelayanan Kesejahteraan dan perlindungan anak belum maksimal | * Adanya dukungan Pemda untuk meningkatkan sarana dan prasaran Dinsosnakertrans * Adanya bantuan Dana APBN untuk pengembangan Sarana dan prasaranan Dinsosnakertrans * Meningkatkan semangat kerja melalui Pembinaan dan Pelatihan/Kursus-kursus |
|  | * Program pembinaan Panti Asuhan/Jompo | * kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Panti Asuhan belum sesuai standard * Tidak adanya tempat penampungan para Lanjut Usia ( Panti ) dan bantuan jaminan hidup belum maksimal | * Alokasi Angaran untuk sarana prasarana Panti masih terbatas * Tidak adanya Panti jompo dan bantuan jaminan hidup belum maksimal | * Tersedianya Tenaga pembina dan sarana prasarana Panti * Tersedianya panti jompo dan bantuan jaminan hidup |
|  | * Program Eks.Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana,PSK, Narkoba dan penyakit social lainnya | * Pelayanan bagi Eks.Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana,PSK, Narkoba dan penyakit social lainnya belum Maksimal | * Pelayanan dan pembiayaan sangat terbatas | * Memberikan motipasi melalui pelatihan / kursus – kursus keterampilan |
|  | * Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial * Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial   Program Pembinaan sumbangan dan Pengawasan Kegi social  Pengembangn Wawasan Kebangsaan  Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa | * Belum optimal peran kelembagaan social di masyarakat ( Karang Taruna, TKSK, PSM dan lembaga lainnya * Belum optimal Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial     -Pemeliharaan TMP belum optimal | * Masih kurang personil PNS Peksos (pekerja social), Karang Taruna, TKSK, PSM dan lembaga lainnya * Alokasi Angaran untuk Bantuan Jaminan Kesos masih terbatas * Masih kurang personil | * Tingginya minat dan keinginan pegawai dan Kelembagaan untuk mengikuti diklat Pekerja Sosial |

Penetapan rencana strategis Dinas Sosial tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis lima tahun mendatang yang diidentifikasi dan dianalisis sebagai berikut :

* 1. **Telaahan Renstra K/L dan Propinsi**

Kondisi Regional sebagian adalah cermin dari kondisi lokal yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan kesos Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan periode 2013-2018 masih terkait dengan Program Kesosnakertrans.

Isu-isu strategis lain baik skala Insternasional dan nasional yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD Dinas Sosial dari faktor-faktor eksternal lainnya adalah:

* Ancaman Globalisasi penyelenggara pelayanan kesosnakertrans.

ini sebagai dampak inplementasi pasar bebas (AFTA) tahun 2015, sehingga dibutuhkan kualitas tenaga peksos dan penunjang lainnya yang mampu unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

* Komitmen internasional diantaranya adalah *Millenium Development Goals (MDG’s)* t
* kondisi regional yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan periode 2013-2018 yang diuraikan per-urusan pemerintahan daerah, dapat dikonkritkan menjadi issu strategis Regional Sulawesi Selatan.
  1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Sehubungan dengan belum adanya Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis, maka telaahan pada sub Bab ini tidak dilakukan.

* 1. **Analisa Faktor Internal dan Eksternal dan Penentuan Isu Isu Strategis**

**3.5.1. Analisa Faktor Internal dan Ekstern**

1. Lingkungan Internal

* Kekuatan (Strengh)
* Adanya keinginan di dalam penaganganan pelayanan Kesos bekerja sama dengan masyarakat (*demand*) yang cukup tinggi.
* Sarana dan prasarana Fisik yang cukup memadai
* Pemanfaatan tenaga ( Peksos, kontrak, TKS dan Orsos ) dalam mendukung pelayanan Kesos
* Tingginya Komitmen pimpinan dan pemda dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesos dan peningkatan kualitas SDM di Dinsos
* Adanya Standar Pelayanan Minimal di Dinsos
* Kelemahan (weakness)
* Kualitas pelayanan Kesos belum maksimal
* Pemanfaatan, pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana
* Terbatasnya tenaga Pekerja sosial dan SDM belum optimal
* Penerapan SPM belum optimal

1. Lingkungan Eksternal

* Peluang (Opportunity)
* Berbagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Organisasi social, Organisasi Profesi/LSM, TKSK, Dunia Usaha, Sumer daya alam, Sumber Daya Manusia, Nilai Budaya yang masih kental dalam masyarakat.
* Adanya dukungan dana APBD, APBD I dan APBN untuk bantuan PMKS, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinsos,
* Kerjasama lintas sektoral dan lintas Kabupaten cukup baik
* Tantangan/ Ancaman (Threat)
* Besarnya permasalahan Kesejahteraan social seperti : Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Keterpencilan, Ketunaan social dan Penyimpangan Perilaku dan Korban bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.
* Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (Iptek, Globalisasi dan arus reffrasi yang berdampak terhadap munculnya permasalahan baru seperti Kenakalan, Narkoba, HIV/AIDS dan pergeseran nilai-nilai masyarakat.
* Kecenderungan Pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan fisik ketimbang pembangunan non fisik seperti penanganan Penyandang Masalah Sosial.
* Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) belum diberdayakan secara makssimal dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan social.
* Propesionalisme penanganan Permasalahan Kesejahteraan sosial belum Maksimal
* Tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap pemenuhan sarana dan kualitas pelayanan kesos semakin tinggi.

Dengan melihat hasil kesimpulan analisa internal dan eksternal diatas diperoleh posisi Dinas social berada di kuadran 1 (strategi pertumbuhan) menunjukkan bahwa peluang untuk tumbuh sangat besar, kekuatan yang dimiliki cukup kuat dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada.

Mengingat Dinsos memiliki posisi strategis dalam menjalankan misi Sosialnakertrans maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus menyangkut pelayanan Kesos. sumber daya yang efektif dan efisien yang akan diuraikan lebih lanjut pada perumusan Strategi .

**3.5.1. Penentuan Isu Isu Strategis**

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Enrekang serta mencermati hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal diatas maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Enrekang. Perlu dijelaskan bahwa pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yakni:

1. Merupakan urusan, tugas dan tanggung jawab Dinas social;
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kesos;
5. Memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pelayanan di Dinas Sosial;
6. Kebijakan/Janji politik Kepala Daerah yang harus diwujudkan.

Isu Strategis yang menjadi prioritas Dinas social Kabupaten Enrekang untuk ditangani dalam kurun waktu 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan social dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social yang sedang dan akan dihadapi dalam jangka waktu 2014-2018 sebagai berikut :

* Kemiskinn
* Keterlantaran
* Kecacatan
* Keterpencilan
* Ketunaan Sosial dan Penyimpangan perilaku
* Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam bentuk penguatan kelembagaan/penguatan kemampuan manajemen bagi Organisasi Social,LSM ,Organissi profesi dan Dunia Usaha yang bergerak dalam bidang usaha-usaha Kesos.
2. Peningkatan sarana dan Prasarana serta pembinaan Panti-Panti Sosial.

\

BAB IV

VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, & KEBIJAKAN

* 1. **Visi dan Misi SKPD Dinas Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan visi OPD Dinas Sosial Tahun 2014-2018 dilakukan dengan memperhatikan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2014), yaitu: ““ Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan” dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik,
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi,
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan,
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri,
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan

Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesosnakertrans , maka Dinas Sosial harus dengan seksama memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam Misi IV RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yaitu : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri. Dengan mempertimbangkan rumusan isu strategis serta berbagai kecenderungan pembangunan Kesosnakertrans kedepan maka Visi Dinas Sosial yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG LEBIH MAPAN SECARA EKONOMI MAUPUN SOSIAL MENUJU ENREKANG MAJU AMAN DAN SEJAHTERA (EMAS)”

Untuk memahami secara konsepsional visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

* Terwujudnya : Suatu tindakan cita cita yang ingin dicapai
* Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) : tingkat pelayanan kesos yang diselenggarakan untuk dapat membantu PMKS ssuai tingkat permasalahannya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
* Lebih mapan secara Ekonomi maupun Sosial : PMKS mampu meningkatkan ekonomi maupun sosial melalui infrastruktur dan sumber daya kesos.
* Dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial Masyarakat : tingkat pelayanan kesos yang diselenggarakan untuk dapat membantu PMKS ssuai tingkat permasalahannya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
* Menuju Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera” : Merupakan Kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas Kesos, ketersediaan Infrastruktur dan sumber daya kesos. Pokok Visi tersebut merupakan bagian dari Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi SKPD Dinas sosial Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan misi mengidentifikasikan apa, dan untuk siapa organisasi, serta produk maupun jasa apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, maka dirumuskan Misi Dinas Sosial Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui upaya sumber daya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. Pengembangan Jejaring dan Pencitraan Sosial melalui Pemberdayaan kelembagaan dan Peningkatan Potensi Sumberdaya Kesehjateraan Sosial.
3. Mengaktualisasikan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
4. Meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat melalui Pemberdayan Dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Setiap misi ini mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat dilihat pada Tabel. 4.1

**Tabel. 4.1.**

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi Renstra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Pokok-pokok Visi | Misi | Penjelasan Misi |
| “TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG LEBIH MAPAN SECARA EKONOMI MAUPUN SOSIAL MENUJU ENREKANG MAJU AMAN DAN SEJAHTERA (EMAS)” | | | |
|  | * Motipasi/dorongan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam membangun ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat * Motipasi/dorongan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam membangun ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat * Motipasi/dorongan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam membangun ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat * Motipasi/dorongan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam membangun ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | * Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui upaya sumber daya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. (M1) * Pengembangan jejaring dan Pencitraan Social melalui Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Potensi Sumer Daya Kesejahteraan sosal (M2) * Mengaktualisasikan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (M3) * Meningkatkan Partisipasi peran serta masyarakat melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial “PMKS” (M4) | * Yaitu melalui optimalisasi Pelayanan kesos rujukan melalui upaya Sumberdaya Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan social Yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan , peningkatan kualitas manajemen dan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana, dan pemenuhan bantuan dan jaminan PMKS.   Kelembagaan Sosial Masyarakat merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, Pekerja sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kerja sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial (Orsos), Wahana Kesejahteraan sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dan Organisasi lainnya.  Penaganan pelestarian terhadap nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial (K2KS) dan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan PMKS |

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Untuk mencapai Visi Dinas sosial dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih konkrit, tajam dan terukur berupa sasaran strategis (*Strategic Objective*) dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018. Tujuan dan Sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran pada Misi I (Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui upaya sumber daya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial) (M1) adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Memberi kesempatan dan peluang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasar. | 1.Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS) |

1. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 2 (Pengembangn jejaring dan Pencitraan Social melalui Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Potensi Sumer Daya Kesejahteraan sosal) (M2) adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat | 1. Meningkatkanm pengembangan jejaring komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan optimalisasi kelembagan dan pemampaatan sumberdaya. |

**3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3** (Mengaktualisasikan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial) (M3)

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |
| 1.Meningkatkan semangat patriotisme (senasib,sepenanggungan dan Nasionalisme Kebangsaan) serta mewujudkan kesetiakawanan sosial dalam NKRI | 1.Megaktualisasi nilai-nilai pelestarian budaya sebagai suatu ketahan sosial melalui pendekatan kearifan lokal |

4.Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4 (Meningkatkan Partisipasi peran serta masyarakat melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS) (M4) adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | 1. Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER |

* 1. **Strategi dan Kebijakan**

**4.3.1 Strategi**

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Strategi dari Tujuan, dan Sasaran berdasar Misi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| VISI : “Terwujudnya Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Lebih Mapan Secara Ekonomi Maupun Sosial Menuju Enrekang Maju Aman Dan Sejahtera (Emas)” | | |
| MISI I Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui upaya sumber daya Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial | | |
| 1. Memberi kesempatan dan peluang kepada Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasar. | 1.Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS) | 1. Meningkatkan usaha social ekonomi, dan bimbingan fisik dan non fisik, serta bantuan dan perlindungan social dalam rangka berdaya guna dan berhasil guna. |
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| MISI 2 Pengembangan jejaring dan Pencitraan Social melalui Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Potensi Sumer Daya Kesejahteraan sosal | | |
| 1.Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat | 1.Meningkatkanm pengembangan jejaring komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan optimalisasi kelembagan dan pemampaatan sumberdaya. | 1. Mengembangkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| --- | --- | --- |
| MISI 3 Mengaktualisasikan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | | |
| 1.Meningkatkan semangat patriotisme (senasib,sepenanggungan dan Nasionalisme Kebangsaan) serta mewujudkan kesetiakawanan sosial dalam NKRI | 1.Megaktualisasi nilai-nilai pelestarian budaya sebagai suatu ketahan sosial melalui pendekatan kearifan lokal | 1. Meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan jiwa nasionalisme sebagi wujud patriotism bagi Generasi Muda dan komponen masyarakat lainnya. |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| --- | --- | --- |
| MISI 4 Meningkatkan Partisipasi peran serta masyarakat melalui Pemberdayaan Dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | |
| 1. Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | 1. Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Meningkatkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpila |

4.3.2. Kebijakan

1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sebagai upaya penguatan dengan melibatkan potensi masyarakat termasuk dunia usaha
2. Meningkatkan fungsi-fungsi jejaring melalui peningkatan kesejahteraan msosial khususnya PMKS.
3. Fasilitasi dan sosialisasi jiwa dan semangat kebangsaan keberbagai komponen dan unsur kelembagaan masyarakat.
4. Meningkatkan pemahaman pada OPD lingkup dinsos untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL KABUPATEN ENREKANG

1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka indikasi kegiatannya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 mencakup 17 (tujuh belas) Program dan 115 (Seratus lima belas) kegiatan, meliputi:

* + 1. Program dan Kegiatan
       1. Program Pemberdayaan Fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil
       2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
       3. Pembinaan Anak Terlantar
       4. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
       5. Program Pembinaan Panti Asuhan/jompo
       6. Program Pembinaan eks.penyandang penyakit sosial (eks.narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
       7. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial
       8. Program Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
       9. Program Pembinaan sumbangan dan pengawasan kegiatan sosial
       10. Program Pengembangan dan wawasan kebangsaan
       11. Program Peningkatan dan pengembangan fasilitas
       12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
       13. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
       14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
       15. Program Peningkatan Kapasilitas Sumber Daya Aparatur
       16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
       17. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

B.Kegiatan

* + - 1. Program Pemberdayaan Fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil

1. Peningkatan kemampuan (Capasity Buikling) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang maslah kesjahteraan sosial (PMKS) lainnya
2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Pendampingan dan monitoring Pemberdaya kel. Fakir Miskin/ Pemberian bantuan kelompok usaha mersama (KUBE) rumah tanga miskin ( RTM)
5. Pendampingan dan monitoring KUBE Penumbuhan dan pengembangan Perkotaan dan Perdesaan
6. Pendampingan dan monitoring kelompok usaha bersama (KUBE) Bantuan langsung Pemberdayaan sosial ( BLPS )
7. Pendampingan dan monitoring Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
8. Pembinaan dlm rangka Peningkatan Kesejahteraan keluarga muda mandiri (KMM) penyandang cacat (PACA) & penyandang masalah keaejahteraan sosial (PMKS) lainnya
9. Bantuan Pemberdaya kel. Fakir Miskin/ Pemberian bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) rumah tangga miskin ( RTM)
10. Bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) Penumbuhan dan pengembangan Perkotaan dan Perdesaan
11. Bantuan jaminan hidup kepada warga komunitas adat terencil KAT DI Desa Bulo Kec. Bungin
12. Penjajakan lokasi Komunitas Adat Terpencil
13. Bantuan Raskin bagi Keluarga miskin
    * + 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesjahteraan sosial (PMKS)
15. Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
16. Koordinasi rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
17. Koordinasi rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
18. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
19. Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
20. Bantuan BBR bagi korban bencana Alam
21. Bantuan BBR bagi korban bencana Sosial
    * + 1. Program Pembinaan Anak Terlantar
22. Koordinasi Pembinaan dan perlindungan sosial anak
23. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
24. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
25. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
26. Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum
    * + 1. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
27. Penyusunan data dan analisis permasalahan penyandang cacat dan truma
28. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
29. Bantuan jaminan hidup bagi cacat permanen
30. Pendampingan dan monitoring bagi Cacat Permanen
31. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat /disabilitas
32. Pembinaan rehab. sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS dan NAPZA (sosialisasi)
33. Pengadaan alat keterampilan elektronik PACA
34. Pembinaan kelompok usaha persama (KUBE) PACA
35. Bantuan pengadaan kaki palsu bagi penyandang cacat

10 Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma

* + - 1. Program Pembinaan Panti Asuhan/jompo

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo
2. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Panti Asuhan
3. Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak kebutuhan dasar Panti Sosial
4. Monitoring , evaluasi dan pelaporan
   * + 1. Program Pembinaan eks.penyandang penyakit sosial (eks.narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
5. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
6. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
7. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
   * + 1. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
9. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
10. Peningkatan kualitas SDM kelembagaan kesejahteraan sosial
11. Koordinasi dan pembinaan Karang Taruna
12. Kemah bakti Karang Taruna
13. Peningkatan SDM karang taruna, TKSK dan PSM
14. Pembentukan pengurus karang taruna kecamatan
15. Monitoring dan pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS
    * + 1. Program Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
16. Bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana
17. Pendampingan Bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana alam dan bencana sosial
18. Bantuan program keserasian sosia
19. Pendampingan Program Keserasian Sosial
20. Bantuan Program Keluarga Harapan
21. Pendampingan dan monitoring Pemberdayaan Program Keluarga Harapan
22. Penyiapan tambahan lokasi kampung siaga bencana di kecamatan
23. Pengadaan sarana dan prasarana korban bencana (handy talky)
24. Insentif anggota Tenaga kerja sosial kecamtan (TKSK), Pekerja sosial masyarakat (PSM) dan Taruna siaga bencana (TAGANA)
25. Bantuan jaminan hidup bagi Lanjut Usia
26. Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia
27. Pemberdayaan korban bencana ( pelatihan Staf Dissos dan masyarkat )
    * + 1. Program Pembinaan sumbangan dan pengawasan kegiatan sosial
28. Koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial pemberian sumbangan serta undian berhadiah
29. Pengendalian dan pengawasan Lembaga Pelaksanaan askesos
30. Sosialisasi berbagai peraturan perundang -undangan pemberiaan sumbangan serta undian berhadia
31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
    * + 1. Program Pengembangan dan wawasan kebangsaan
32. Koordinasi dan fasilitasi Hari-Hari Nasional serta pemeliharaan TMP dan TMB
33. Pembutan pagar TMB Maroangin
34. Koordinasi dan fasilitasi bingkisan kepada keluarga Pahlawan, Veteran dan perintis Kemerdekaan
35. Pembuatan jalan utama dan jalan setapak TMB Mroangin
36. Pembangunan tembok abadi dan tugu TMP Maspul
37. Peringatan hari kesetiakawanan sosial Nasional ( HKSN )
38. Pembangunan rumah persemayaman dan rumah jaga TMP Maspul
39. Pembangunan pintu gebang utama dan pagar TMB Maroangin
    * + 1. Program Peningkatan dan pengembangan fasilitas
40. Pembuatan sarana Ibada (Mushallah) kebun raya Enrekang
41. Monitoring dan evaluasi pembuatan sarana Ibadah
    * + 1. Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam membangun desa

Monitoring dan Pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS

* + - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
5. Koordinasi konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan
6. Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran
7. Penyediaan ATK
8. Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
   * + 1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10. Pembangunan gedung kantor
11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
12. Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14. Pengadaan meubiler
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala serta koordinasi pendayagunaan kendaraan dinas/operasional Lembaga konsulatasi Kesejhteraan Keluarga ( LKS )
18. Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
20. Pemeliharaan rutin /berkala meubiler
    * + 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21. Pengadaan pakaian KORPRI dan pasangannya
22. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya ( PSH)
23. Pengadaan baju batik dan pasangannya
24. Pengadaan pakaian olah raga
    * + 1. Program Peningkatan Kapasilitas Sumber Daya Aparatur
25. Pendidikan dan pelatihan tehnis tugas dan fungsi bagi PNS
    * + 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
      1. Penyusunan laopran catatan kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD
      2. Penyusunan pelaporan keuangan bulan,triwulan, semesteran dan akhir tahun
      3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
      4. Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan
      5. laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
      6. Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM)
         1. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan DPA-SKPD

Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana kerja ( RENJA )

Penyusunan RPJMD

Penyusunan profil dan data base DSTT

Monitoring evaluasi dan pelaporan progrm kegiatan

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator knerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif akan disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATAN ENREKANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE | | | | | BIDANG URUSAN | INDIKATOR | | KONDISI | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEMERINTAHAN DAN | KINERJA | | KINERJA | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | KONDISI KINERJA | | | | | | |
| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM | | AWAL | PADA AKHIR PERIODE | | | | | | |
| PEMBANGUNAN | (OUTCOME) | | RPJMD | RPJMD | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | (TAHUN 0) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | Target | Rp. (000) | | | | | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | Urusan Perencanaan Pembangunan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | 1 | 6 | 1.13.01 | 21 |  | Program perencanaan pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang diterbitkan | |  |  | 37,500,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 80% | 38,000,000 | | 80% | 75,500,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 6 | 1.13.01 | 21 | 03 | Penyusunan Renstra | Bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 tahun kedepan | |  | 1 Dok (Renstra SKPD) | 37,500,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 Dok (Renstra SKPD) | 38,000,000 | | 2 Dok (Renstra SKPD) | 75,500,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 |  |  |  | Urusan Sosial |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100% | 20% | 692,862,000 | 40% | 736,742,712 | 60% | 736,742,712 | 80% | 736,742,712 | 100% | 799,000,000 | | 100% | 3,702,090,136 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air,listrik | | 1 thn | 1 thn | 40,000,000 | 1 thn | 55,000,000 | 1 thn | 55,000,000 | 1 thn | 55,000,000 | 1 thn | 60,000,000 | | 6 thn | 265,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 10 | Penyediaan ATK | Terwujudnya aktivitas operasional kantor | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | Suasana kantor aman dan nyaman | | 1 thn | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 15,000,000 | 1 thn | 15,000,000 | 1 thn | 15,000,000 | 1 thn | 17,000,000 | | 6 thn | 67,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Informasi/berita serta peraturan perundang-undangan dapat diketahui | | 1 thn | 1 thn | 8,000,000 | 1 thn | 10,000,000 | 1 thn | 10,000,000 | 1 thn | 10,000,000 | 1 thn | 15,000,000 | | 6 thn | 53,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Aktivitas kantor berjalan dengan baik | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 18 | Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terwujudnya koordinasi dan konsultasi program SKPD | | 1 thn | 1 thn | 167,120,000 | 1 thn | 170,000,000 | 1 thn | 170,000,000 | 1 thn | 170,000,000 | 1 thn | 190,000,000 | | 6 thn | 867,120,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 19 | Koordinasi konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan | Terwujudnya koordinasi konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan | | 1 thn | 1 thn | 128,500,000 | 1 thn | 130,742,712 | 1 thn | 130,742,712 | 1 thn | 130,742,712 | 1 thn | 150,000,000 | | 6 thn | 670,728,136 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 20 | Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran | Terwujudnyanya aktivitas operasional kantor | | 1 thn | 1 thn | 340,242,000 | 1 thn | 350,000,000 | 1 thn | 350,000,000 | 1 thn | 350,000,000 | 1 thn | 360,000,000 | | 6 thn | 1,750,242,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 01 | 21 | Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor | Bersihnya lingkungan kantor dan perlengkapan rumah tangga kantor | | 1 thn | 1 thn | 4,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | 1 thn | 7,000,000 | | 6 thn | 29,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 |  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | 95% | 20% | 257,238,000 | 40% | 306,000,000 | 60 | 311,000,000 | 80% | 306,000,000 | 95% | 337,000,000 | | 95% | 1,517,238,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 01 | Pembangunan gedung kantor dan | Terwujudnya bangunan kantor dan gudang | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 2 unit | 3 unit | 66,120,000 | 4 unit | 35,000,000 | 4 unit | 35,000,000 | 4 unit | 35,000,000 | 4 unit | 40,000,000 | | 21 unit | 211,120,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 07 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | | 9 unit | 13 unit | 66,668,000 | 10 unit | 50,000,000 | 10 unit | 55,000,000 | 10 unit | 50,000,000 | 10 unit | 60,000,000 | | 52 unit | 281,668,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 08 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | | - | - | 0 | 5 unit | 31,000,000 | 5 unit | 31,000,000 | 5 unit | 31,000,000 | 5 unit | 40,000,000 | | 20 unit | 133,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 09 | Pengadaan meubiler | Tersedianya meubiler | | - | - | 0 | 5 unit | 20,000,000 | 5 unit | 20,000,000 | 5 unit | 20,000,000 | 5 unit | 20,000,000 | | 20 unit | 80,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Aktivitas kantor berjalan dengan baik | | 1 thn | 1 thn | 41,000,000 | 1 thn | 40,000,000 | 1 thn | 40,000,000 | 1 thn | 40,000,000 | 1 thn | 40,000,000 | | 6pkt | 201,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 1 thn | 1 thn | 63,450,000 | 1 thn | 65,000,000 | 1 thn | 65,000,000 | 1 thn | 65,000,000 | 1 thn | 65,000,000 | | 6pkt | 323,450,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 25 | Koordinasi dan fasilitasi pelayanan permasalahan sosial melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ( LK3 ) | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 1 thn | - | 0 | 1 thn | 35,000,000 | 1 thn | 35,000,000 | 1 thn | 35,000,000 | 1 thn | 35,000,000 | | 6pkt | 140,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 28 | Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 1 thn | 1 thn | 17,000,000 | 1 thn | 20,000,000 | 1 thn | 20,000,000 | 1 thn | 20,000,000 | 1 thn | 25,000,000 | | 6pkt | 102,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 1 thn | 1 thn | 0 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | | 6pkt | 21,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 02 | 30 | Pemeliharaan rutin /berkala meubiler | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | 1 thn | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | | 6pkt | 24,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 03 |  | Peningkatan Disiplin Aparatur | Terciptanya peningkatan disiplin aparatur yang maksimal | | 0% | 20% | 0 | 40% | 20,000,000 | 60% | 16,400,000 | 80% | 39,900,000 | 100% | 17,200,000 | | 100% | 93,500,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 03 | 01 | Pengadaan pakaian KORPRI dan pasangannya | Tersedianya pakaian korpri | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 41 org | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya ( PSH) | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | - | - | 0 | 40 org | 20,000,000 | - | 0 | 42 org | 21,000,000 | - | 0 | | 82 org | 41,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 03 | 03 | Pengadaan baju batik dan pasangannya | Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 42 org | 18,900,000 | - | 0 | | 82org | 18,900,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 03 | 04 | Pengadaan pakaian olah raga | Tersedianya pakaian olah raga | | - | - | 0 | - | 0 | 41 org | 16,400,000 | - | 0 | 43 org | 17,200,000 | | 84 org | 33,600,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 05 |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya pelayanan kapasitas sumber daya aparatur mlalui bimbingan dan pelatihan SDM aparatur | | 15 org | 12 org | 53,000,000 | 15 org | 55,000,000 | 17 org | 70,000,000 | 20 org | 54,681,182 | 25 org | 80,000,000 | | 104 org | 312,681,182 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 05 |  | Pendidikan dan pelatihan tehnis tugas dan fungsi bagi PNS |  | | 15 org | 12 org | 53,000,000 | 15 org | 55,000,000 | 17 org | 70,000,000 | 20 org | 54,681,182 | 25 org | 80,000,000 | | 104 org | 312,681,182 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 |  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuanagn | Tersusunnya peningkatan pengembangan sistem pelaopran capaian kinerja Dissos Nakertrans | |  | 6 dok. | 37,500,000 | 6 dok. | 35,000,000 | 6 dok. | 45,000,000 | 6 dok. | 46,000,000 | 6 dok. | 47,000,000 | |  | 210,500,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan catatan kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD | Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja Dinsos Nakertrans | | 6 dok | 6 dok | 3,000,000 | 6 dok | 3,000,000 | 6 dok | 3,000,000 | 6 dok | 3,000,000 | 6 dok | 3,000,000 | | 306dok | 15,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 02 | Penyusunan pelaporan keuangan bulan,triwulan, semesteran dan akhir tahun | Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja Dinsos Nakertrans | |  | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | | 6thn | 15,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 03 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terpenuhinya kewajiban laporan keuangan akhir tahun | | 1 thn | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | | 6thn | 15,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 04 | Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan | Terpenuhinya kewajiban laporan fisik dan keuangan | | 1 thn | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | | 6thn | 15,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 21 | llaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Terpenuhinya kewajiban laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | | 1 thn | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | 1 thn | 3,000,000 | | 6thn | 15,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 22 | Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) | Terpenuhinya kewajiban laporan standar pelayanan minimal (SPM) | | - | 1 thn | 5,500,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 5,000,000 | 1 thn | 6,000,000 | 1 thn | 7,000,000 | | 6thn | 28,500,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 06 | 23 | Monitoring evaluasi dan pelaporan progrm kegiatan | Terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan progrm kegiatan | |  | 1 thn | 17,000,000 | 1 thn | 15,000,000 | 1 thn | 25,000,000 | 1 thn | 25,000,000 | 1 thn | 25,000,000 | | 5 thn | 107,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 09 |  | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Tersusunnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Dinsos Nakertrans | |  |  | 15,500,000 |  | 14,000,000 |  | 14,500,000 |  | 14,500,000 |  | 14,500,000 | |  | 73,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 09 | 01 | Penyusunan RKA-SKPD | Terwujudnya pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran dalam 1 tahun | |  | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | | 60 explr | 25,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 09 | 02 | Penyusunan DPA-SKPD | Terwujudnya pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran dalam 1 tahun | |  | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | 12 explr | 5,000,000 | | 60 explr | 25,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 09 | 06 | Penyusunan Rencana kerja ( RENJA ) | Terwujudnya pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran dalam 1 tahun ke depan | |  | 6 explr | 5,500,000 | 6 explr | 4,000,000 | 6 explr | 4,500,000 | 6 explr | 4,500,000 | 6 explr | 4,500,000 | | 30 explr | 23,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 32 |  | Peningkatan dan pengembangan fasilitas | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan fasilitas | | 0% | 30% | 70,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 100% | 70,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 32 | 01 | Pembuatan sarana Ibada (Mushallah) kebun raya Enrekang | Terwujudnya bangunan Mushallah kebun raya Enrekang | | 1 pkt | 1 pkt | 70,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 70,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 32 | 02 | Monitoring dan evaluasi pembuatan sarana Ibadah | Terwujudnya monitoring dan evaluasi pembuatan sarana Ibadah | | - | - | 0 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | | - |  | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS)  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 |  | Pemberdayaan Fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya | Persentase PMKS yang mendapat pelayanan /rehabilitasi kesejahteraan social | | 23% | 23% | 102,500,000 | 40% | 120,000,000 | 60% | 344,308,933 | 70% | 345,000,000 | 80% | 331,748,554 | | 80% | 1,243,557,487 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 02 | Peningkatan kemampuan (Capasity Buikling) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang maslah kesjahteraan sosial (PMKS) lainnya | Meningkatnya pembinaan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin (KAT)dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 03 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | Meningkatnya kemampuan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 30 org | 30,000,000 |  | 0 | | 55 org | 30,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 04 | Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Meningkatnya kemampuan keterampilan bagi penyandang msalah kesejahteraan social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | | 60 org | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 05 | Pendampingan dan monitoring Pemberdaya kel. Fakir Miskin/ Pemberian bantuan kelompok usaha mersama (KUBE) rumah tanga miskin ( RTM) | Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin dan Kelompok Usaha bersama rumah tangga miskin yang mendapat bantuan | | - | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 06 | Pendampingan dan monitoring KUBE Penumbuhan dan pengembangan Perkotaan dan Perdesaan | Terwujudnya kelompok Usaha bersama penumbuhan dan pengembangan perkotaan dan perdesaan yang akan mendapat bantuan | | 12kec |  | 23,000,000 | 12 kec | 25,000,000 |  | 0 | 12 kec | 25,000,000 | 12 kec | 25,000,000 | | 12 kec | 98,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 07 | Pendampingan dan monitoring kelompok usaha bersama (KUBE) Bantuan langsung Pemberdayaan sosial ( BLPS ) | Terwujudnya Kelompok Usaha bersama yang akan mendapat bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) | | 12kec |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 08 | Pendampingan dan monitoring Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) | Terwujudnya warga komunitas adat terpencil (KAT) yang akan mendapat bantuan perumahan dan jaminan hidup | | 125 kk | 50 kk | 25,000,000 |  | 30,000,000 | 50 kk | 25,000,000 | 50 kk | 25,000,000 |  | 0 | | 175 kk | 105,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 09 | Pembinaan dlm rangka Peningkatan Kesejahteraan keluarga muda mandiri (KMM) penyandang cacat (PACA) & penyandang masalah keaejahteraan sosial (PMKS) lainnya | Terwujudnya keluarga muda mandiri, penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan mendapat binaan | | 12kec | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 10 | Bantuan Pemberdaya kel. Fakir Miskin/ Pemberian bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) rumah tangga miskin ( RTM) | Terwujudnya rumah tangga miskin (RTM) yang akan mendapat bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) | | 12kec |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 11 | Bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) Penumbuhan dan pengembangan Perkotaan dan Perdesaan | Terwujudnya rumah tangga miskin (RTM) yang akan mendapat bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) penumbuhan dan pengembangan perkotaan dan perdesaan | | 12kec |  | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 12 | Bantuan jaminan hidup kepada warga komunitas adat terencil KAT DI Desa Bulo Kec. Bungin | Terwujudnya bantuan jaminan hidup kepada warga komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Bulo Kec. Bungin | | 50 +kk | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 13 | Penjajakan lokasi Komunitas Adat Terpencil | Terwujudnya penjajakan lokasi Komunitas Adat Terpencil | | - | - | 0 | 70 kk | 25,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 70 kk | 25,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 14 | Pengelolah distribu raskin bagi keluarga kurang mampu | Terwujudnya bantuan raskin kepada keluarga kurang mampu | | 13.843 rtm | 12459rtm | 0 | 11214 rtm | 0 | 10093rtm | 200,000,000 | 10093rtm | 200,000,000 | 8176rtm | 200,000,000 | | 8176rtm | 600,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 15 | Penyusunan profil dan data base DSTT ( Pemutahiran data | Tersedianya bahan data untuk penyusunan propil Dinsos Nakertrans | |  | 1 thn | 54,500,000 | 1 thn | 40,000,000 | 1 thn | 119,308,933 | 1 thn | 65,000,000 | 1 thn | 106,748,554 | | 5 thn | 385,557,487 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 15 | 16 | Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Tersedianya data PMKS | |  | 1 thn |  |  |  |  | 27.000.000 |  |  |  |  | |  | 27.000.000 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan social dengan program DSM | Terkoodinasinya penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan social dengan dengan program DSM | |  | 1 thn |  |  |  |  |  |  | 40.000.000 |  | 40.000.000 | |  | 80.000.000 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pendampingan bantuan modal dan jasa dalam rangka penguatan ekonomi desa | Terkoodinirnyabantuan modal dan jasa dalam rangkapenguatan ekonomi desa | |  | 1 thn |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000.000 | |  | 40.000.000 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS)  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 |  | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Per`sentase PMKS yang mendapat pelayanan /rehabilitasi kesejahteraan sosial | | 23% | 23% | 27,000,000 | 35% | 55,000,000 | 50% | 70,000,000 | 65% | 95,000,000 | 80% | 110,000,000 | | 80% | 357,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 03 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesjahteraan sosial (PMKS) melalui (LK3) | Terlaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesjahteraan sosial (PMKS) melalui (LK3) | | - | - | 0 | 12 kec | 25,000,000 | - | 0 | 12 kec | 40.000.000 | - | 0 | | 12 kec | 50,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 04 | Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social | Tersusunnya kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 05 | Koordinasi rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | Terwujudnyanya Koordinasi rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 06 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Terwujudnya rehabilitasi rumah tidak layak huni | | 750 rtm | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 07 | Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Terwujudnya pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | | 750 rtm | 59 850 rtm | 27,000,000 | 59 850 rtm | 30,000,000 | 59 850 rtm | 30,000,000 | 59 850 rtm | 30,000,000 | 59 850 rtm | 30,000,000 | | 3000 rtm | 147,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 08 | Bantuan BBR bagi korban bencana Alam | Terwujudnya bantuan bangunan rumah (BBR) bagi korban bencana Alam | | - | - | 0 | - | 0 | 50 kk | 40,000,000 | 50 kk | 40,000,000 | 50 kk | 40,000,000 | | 200 kk | 120,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 09 | Bantuan BBR bagi korban bencana Sosial | Terwujudnya bantuan bantuan bangunan rumah (BBR) bagi korban bencana Sosial | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 25 kk | 40,000,000 | | 100 kk | 40,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 16 | 09 | Pendampingan dan monitoring Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Termonitoringnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | - | - | 0 | - | 0 | - | 52.017.000 | - | 0 | 25 kk | 40,000,000 | | 100 kk | 70.000.000 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan genderM. | . Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS)  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 |  | Pembinaan Anak Terlantar | Persentase anak terlantar yang mendapat pembinaan | | 23% | 23% | 15,000,000 | 25% | 65,000,000 | 30% | 75,000,000 | 35% | 77,000,000 | 40% | 50,000,000 | | 40% | 282,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 | 01 | Koordinasi Pembinaan dan perlindungan sosial anak | Meningkatnya pembinaaan dan perlindungan sosial anak | |  |  | 15,000,000 |  | 40,000,000 |  | 45,000,000 |  | 47,000,000 |  | 50,000,000 | |  | 197,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 | 02 | Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar | Terabdetnya data dan analisis permasalahan anak terlantar | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 | 03 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Meningkatnya kemampuan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar | | - | - | 0 | 20 org | 25,000,000 | 30 org | 30,000,000 | 30 org | 30,000,000 | - | 0 | | 30 org | 85,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 | 04 | Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar | Meningkatnya keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 40 org | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 17 | 05 | Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum | Terlaksananya perlindungan dan rehabilitasi sosial nak yang berhadapan dengan hokum | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan genderM. | Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS)  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 |  | Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Persentase penyandang cacat yang mendapat program sosial | | 23% | 23% | 25,000,000 | 30% | 39,250,000 | 40% | 55,000,000 | 50% | 60,000,000 | 60% | 57,000,000 | | 60% | 236,250,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 01 | Penyusunan data dan analisis permasalahan penyandang cacat dan truma | Tersusunnya data dan analisis permasalahan penyndang cacat dan trauma | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 12 kec | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 02 | Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik | Meningkanya keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 40 org | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 03 | Bantuan jaminan hidup bagi cacat permanen | Terwujudnya bantuan jaminan hidup bgi cacat permanem | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 org | 30,000,000 | - | 0 | | 40 org | 30,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 04 | Pendampingan dan monitoring bagi Cacat Permanen | Terwujudnya pendampingan dan monitoring bagi Cacat Permanen | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 12 kec | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 05 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat /disabilitas | Meningkatnya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat | | 126 org | 20 org | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 30 org | 30,000,000 | 30 org | 30,000,000 | 30 org | 30,000,000 | | 236 org | 140,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 06 | Pembinaan rehab. sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS dan NAPZA *(sosialisasi)* | Terlaksananya pembinaan rehab. sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS dan NAPZA *(sosialisasi)* | | - | - | 0 | - | 0 | 50 org | 25,000,000 |  | 0 | 50 org | 27,000,000 | | 150 org | 52,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 07 | Pengadaan alat keterampilan elektronik PACA | Bertambahnya alat keterampilan elektronik PACA | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 1 pkt | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 08 | Pembinaan kelompok usaha persama (KUBE) PACA | Jumlah kelompok usaha bersama penyandang cacat yang terbina | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 15 kube | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 09 | Bantuan pengadaan kaki palsu bagi penyandang cacat | Jumlah penyandang cacat yang mendapat bantuan kaki palsu | | - | - | 0 | - | 14,250,000 | 5 org | 0 |  | 0 |  | 0 | |  | 14,250,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 18 | 10 | Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma | Jumlah penyandang cacat dan trauma yang di berdayagunakan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | .Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | usaha social ekonomi, dan bimbingan fisik dan non fisik, serta bantuan dan perlindungan social dalam rangka berdaya guna dan berhasil guna.  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 |  | Pembinaan Panti Asuhan/jompo | Persentase pemulihan jaminan hidup bagi jompo dan kearah kemandirian bagi anak asuhan dalam panti | | 6 panti | 6 panti | 35,000,000 | 6 panti | 60,000,000 | 6 panti | 40,000,000 | 8 panti | 70,000,000 | 8 panti | 40,000,000 | | 8 panti | 245,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 03 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Jompo | Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti | | - | - | 0 | - | 25,000,000 | - | 0 | 30 org | 30,000,000 | - | 0 | | 60 org | 55,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 04 | Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Panti Asuhan | Meningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik Panti Asuhan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |  | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 05 | Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak kebutuhan dasar Panti Sosial | Terwujudnya dan tertanganinya pemenuhan hak kebutuhan dasar panti social | | 6 panti | 6 panti | 35,000,000 | 6 panti | 35,000,000 | 6 panti | 40,000,000 | 6 panti | 40,000,000 | 6 panti | 40,000,000 | | 6 panti | 190,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 06 | Monitoring , evaluasi dan pelaporan | Terwujudnnya monitoring , evaluasi dan pelaporan | | - | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | .Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | usaha social ekonomi, dan bimbingan fisik dan non fisik, serta bantuan dan perlindungan social dalam rangka berdaya guna dan berhasil guna.  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 20 | Pembinaan eks.penyandang penyakit sosial ( eks.narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya ) | Persentase eks penyandang masalah sosial yang mendapat program kesos | | 23% | - | 0 | 23% | 30,000,000 | 35% | 30,000,000 | 45% | 30,000,000 | 60% | 0 | | 60% | 90,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 01 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Meningkatnya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks.penyandang penyakit sosial | | - | - | 0 | 30 org | 30,000,000 | 30 org | 30,000,000 | 30 org | 30,000,000 | - | 0 | | 60 org | 90,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 02 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial | Terwujudnya pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks.penyandang penyakit social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 19 | 03 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Terwujudnya pemberdayaan eks penyandang penyakit social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat | Meningkatkanm pengembangan jejaring komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan optimalisasi kelembagan dan pemampaatan sumberdaya. | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS) | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 |  | Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial | Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan | | 23% | 23% | 45,000,000 | 40% | 75,000,000 | 50% |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 01 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan duna usaha | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 02 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Meningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | |  | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 03 | Peningkatan kualitas SDM kelembagaan kesejahteraan social | Meningkatan kualitas SDM kelembagaan kesejahteraan social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 04 | Koordinasi dan pembinaan Karang Taruna | Terlaksannya koordinasi dan pembinaan Karang Taruna | | 1 pkt | 1 pkt | 45,000,000 | 1 pkt | 75,000,000 | 1 pkt | 76,000,000 | 1 pkt | 77,000,000 | 1 pkt | 78,000,000 | | 1 pkt | 351,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 05 | Kemah bakti Karang Taruna | Terlaksannya kemah bakti Karang Taruna | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 06 | Peningkatan SDM karang taruna, TKSK dan PSM | Meningkatan SDM karang taruna, TKSK dan PSM | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 21 | 07 | Pembentukan pengurus karang taruna kecamatan | Terwujudnya pembentukan pengurus karang taruna kecamatan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat  Mewujudkan akselerasi percepatan pembangunan PMKS melalui pengarusutamaan gender | .Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat dan Penyandang Maslah Kesejahteraan sosial (PMKS)  Meningkatnya kepedulian para stakholder melalui penanganan PMKS berbasis GENDER | usaha social ekonomi, dan bimbingan fisik dan non fisik, serta bantuan dan perlindungan social dalam rangka berdaya guna dan berhasil guna.  Meningktkan pengarusutamaan Gender bagi PMKS melalui strategi data terpilah. | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 |  | Bantuan dan jaminan kesejahteraan social | Persentase bantuan dan jaminan sosial | | 23% | 23% | 218,000,000 | 30% | 311,000,000 | 50% | 236,000,000 | 70% | 245,000,000 | 80% | 257,000,000 | | 80% | 1,267,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 01 | Bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana | Terwujudnya bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana | | 342 kk | 50 kk | 70,000,000 | 50 kk | 80,000,000 | 50 kk | 85,000,000 | 50 kk | 90,000,000 | 50 kk | 95,000,000 | | 250 kk | 420,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 02 | Pendampingan Bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana alam dan bencana sosial | Terwujudnya pendampingan Bantuan Logistik Pemulihan Sosial untuk korban bencana alam dan bencana social | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 03 | Bantuan program keserasian social | Terwujudnya bantuan program keserasian sosil kepada masyarakat rawan konplik | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 04 | Koordinasi danPendampingan Program Keserasian Sosial | Terwujudnya pendampingan Program Keserasian Sosial | | 20 desa | 4 desa | 20,000,000 | 3 desa | 25,000,000 | 3 desa | 32,000,000 | 3 desa | 33,000,000 | 3 desa | 35,000,000 | | 16 desa | 145,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 05 | Bantuan Program Keluarga Harapan | Terwujudnya bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarkat miskin | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 06 | Koordinasi Pendampingan dan monitoring Pemberdayaan Program Keluarga Harapan | Terlaksananya pendampingan dan monitoring Pemberdayaan Program Keluarga Harapan | | 2.022 org | 2.022 org | 98,000,000 | 2.022 org | 100,000,000 | 2.022 org | 30,000,000 | 2.022 org | 32,000,000 | 2.022 org | 35,000,000 | | 2.022 org | 295,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 07 | Penyiapan tambahan lokasi kampung siaga bencana di kecamatan | terlaksannya penjajakan tambahan lokasi kampung siaga bencana di kecamatan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 08 | Pengadaan sarana dan prasarana korban bencana | Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana korban bencana | | - | - | 0 | 10 bh | 20,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 10 bh | 20,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 09 | Insentif anggota Tenaga kerja sosial kecamtan (TKSK), Pekerja sosial masyarakat ( PSM) dan Taruna siaga bencana (TAGANA) | Meningkatya tambahan penghasilan bagi anggota Tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK), Pekerja sosial Masyarakat (PSM) dan taruna siaga bencna ( Tagana ) | | - | - | 0 | 20 org | 61,000,000 | 20 org | 62,000,000 | 20 org | 62,000,000 | 20 org | 62,000,000 | | 80 org | 247,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 10 | Bantuan jaminan hidup bagi Lanjut Usia | Terwujudnya bantuan jaminan hidup bagi lanjut usia | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 11 | Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia | Terwujudnya pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia | | 106 LU | 30 LU | 30,000,000 | 30 LU | 25,000,000 | 30 LU | 27,000,000 | 30 LU | 28,000,000 | 30 LU | 30,000,000 | | 56 LU | 140,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 22 | 12 | Pemberdayaan korban bencana ( pelatihan Staf Dissos dan masyarkat ) | Meningkatnya kemampuan SDM dinas sosial dan masyarkat dalam penanganan masalah bencana | | - | - | 0 | 40 org | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 40 org | 0 | | | | | |
| Meningkatkan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) dalam potensi sumber dayaa kesos (PSKS) menuju penanganan PMKS berbasis masyarakat | Meningkatkanm pengembangan jejaring komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan optimalisasi kelembagan dan pemampaatan sumberdaya. | Mengembngkan dan mengoptimalkan jarinan kerja kelembagaan dalam berbagai bidang kelembagaan dalam bidang yang terkait penyandang masalah penyandang maslah kesejahteraan social (PMKS) | 1 | 13 | 01 | 23 |  | Pembinaan sumbangan dan pengawasan kegiatan sosial | Meningkatnya pembinan sumbangan dan pengawasan kegiatan sosial | | 20% | 30% | 40,000,000 | 45% | 45,000,000 | 55% | 48,000,000 | 65% | 50,000,000 | 80% | 53,000,000 | | 80% | 236,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 23 | 01 | Koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial pemberian sumbangan serta undian berhadiah | Terlwujudnya koordinasi dan pengawasan kegiatan sosial pemberian sumbangan serta undian berhadiah | | 1 kl | 1 kl | 25,000,000 | 1 kl | 25,000,000 | 1 kl | 26,000,000 | 1 kl | 27,000,000 | 1 kl | 28,000,000 | | 6 kl | 131,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 23 | 02 | Pengendalian dan pengawasan Lembaga Pelaksanaan askesos | Meningkatnya pengendalian dan pengawasan lembaga pelaksanaan askesos | | 1 kl | 1 kl | 15,000,000 | 1 kl | 20,000,000 | 1 kl | 22,000,000 | 1 kl | 23,000,000 | 1 kl | 25,000,000 | | 6 kl | 105,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 23 | 03 | Sosialisasi berbagai peraturan perundang -undangan pemberiaan sumbangan serta undian berhadia | Meningkatnya SDM Masyarakat tentang peraturan perundang - undangan pemberiaan sumbangan serta undian berhadia | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 13 | 1.13.01 | 23 | 04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 14 |  |  |  | Urusan Ketenagakerjaan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 |  |  |  | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| Meningkatkan semangat patriotisme (senasib,sepenanggungan dan Nasionalisme Kebangsaan ) serta mewujudkan kesetiakawanan social dlam NKRI | Mengaktualisasi -nilai pelestarian budaya sebagai suatu ketahanan social melalui pendekatan kearipan lokal | Meningkatkan, mengembangkn dan melestarikan jiwa Nasionalisme sebagai wujud patriotisme Generasi Muda dan Komponen masyarakat lainnya | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 |  | Pengembangan dan wawasan kebangsaan | Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaanl | | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 157,000,000 | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 165,750,000 | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 95,000,000 | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 100,000,000 | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 105,000,000 | | TMP/TMB dan pejuang keperintisan | 622,750,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 01 | Koordinasi dan fasilitasi Hari-Hari Nasional serta pemeliharaan TMP dan TMB | Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi Hari-Hari Nasional serta pemeliharaan TMP dan TMB | | 1 pkt | 1 pkt | 55,000,000 | 1 pkt | 135,000,000 | 1 pkt | 60,000,000 | 1 pkt | 60,000,000 | 1 pkt | 60,000,000 | | 1 pkt | 370,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 02 | Pembutan pagar TMB Maroangin | Porsentase pembutan pagar TMB Maroangin | | - | 40% | 75,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 40% | 75,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 03 | Koordinasi dan fasilitasi bingkisan kepada keluarga Pahlawan, Veteran dan perintis Kemerdekaan | Meningkatnya kepedulian kepada keluarga Pahlawan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan | | 40 org | 40 org | 27,000,000 | 40 org | 30,750,000 | 40 org | 35,000,000 | 40 org | 40,000,000 | 40 org | 45,000,000 | | 200 org | 177,750,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 04 | Pembuatan jalan utama dan jalan setapak TMB Mroangin | Pembuatan jalan utama dan jalan setapak TMB Maroangin | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 05 | Pembangunan tembok abadi dan tugu TMP Maspul | Porsentase pembangunan tembok abadi dan tugu TMB Maroangin | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 06 | Peringatan hari kesetiakawanan sosial Nasional ( HKSN ) | Meningkatnya partisipasi pada hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ( HKSN ) | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 07 | Pembangunan rumah persemayaman dan rumah jaga TMP Maspul | Terwujudnya pembangunan rumah persemayaman TMP dan TMB Maroangin | | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | |  | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 19 | 1.13.01 | 17 | 08 | Pembangunan pintu gebang utama dan pagar TMB Maroangin | Porsentase pembangunan pintu gebang utama dan pagar TMB Maroangin | | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | - | 0 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 22 |  |  |  | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | 1 | 22 | 1.13.01 | 17 |  | Peningkatan partisipasi masyarkat dalam membangun desa | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan desa | | 1 pkt | 1 pkt | 35,000,000 | - | 35,000,000 | - | 35,000,000 | - | 35,000,000 | - | 40,000,000 | | 1 pkt | 180,000,000 | | | | | |
|  |  |  | 1 | 22 | 1.13.01 | 17 | 05 | Monitoring dan pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS | Terwujudnya monitoring dan pembinaan warga di lokasi lomba desa dan P2WKSS | | 1 pkt | 1 pkt | 35,000,000 | 1 pkt | 35,000,000 | 1 pkt | 35,000,000 | 1 pkt | 35,000,000 | 1 pkt | 40,000,000 | | 1 pkt | 180,000,000 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL | | |  |  | 2,036,100,000 |  | 2,391,742,712 |  | 2,503,951,645 |  | 2,627,323,894 |  | 2,712,448,554 | |  | 12,271,566,80 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enrekang 2017 | | | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kepala, | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drs.H.YUNUS RAJUDDIN,MM | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19581231 199203 1 042 | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |  | |

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 6.1 | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | | | | | | | | |
| SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | | | | | | |
| No | INDIKATOR | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|  |  | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang diterbitkan | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok |
| 2 | Persentase fakir miskin dan kumintas adat terpencil yang diberdayakan | 23% | 25% | 40% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| 3 | Persentase PMKS yang mendapat pelayanan / rehabilitasi Kesejahteraan social | 23% | 25% | 30% | 45% | 65% | 80% | 80% |
| 4 | Persentase anak terlantar yang mendapat pembinaan | 23% | 25% | 27% | 30% | 35% | 40% | 40% |
| 5 | Persentase penyandang cacat yng mendapat program sosial | 23% | 25% | 27% | 30% | 40% | 60% | 60% |
| 6 | Jumlah panti asuhan / panti jompo yang terbina | 6 Panti | 6 Panti | 6 Panti | 6 Panti | 8 Panti | 8 Panti | 8 Panti |
| 7 | Persentase eks penyandang masalah sosial yang mendapat pembinaan kessos | 23% | 25% | 27% | 30% | 40% | 60% | 60% |
| 8 | Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan | 23% | 25% | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% |
| 9 | Pesentase Bantuan dan Jaminan Sosial | 23% | 25% | 30% | 50% | 70% | 80% | 80% |
| 10 | Persentase pembinaan sumbangan dan bantuan sosial | 23% | 25% | 30% | 50% | 70% | 80% | 80% |
| 14 | Jenis Objek / media pengembangan wawasan kebangsaan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan | TMP / TMB & Pejuang Keperintisan |
| 16 | Tingkat Pelayanan Adminsitrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur yang ada | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Tingkat pemenuhan kebutuhan Sapras dasar Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan) | 75% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 18 | Tingkat keseragaman pakaian dinas Apratur | 80% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Tingkat kompetensi aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 20 | Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan yang dipersyaratkan | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kab.Enrekang merupakan penjabaran dari Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas sosial menghadapi tantangan pembangunan Dinsos yang semakin kompleks, berlangsung pesat dan tidak menentu.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2014 – 2018 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan arahan /strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Dengan demikian, maka diharapkan Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya sedapat mungkin dapat diukur dan juga diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD.

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Oleh Karena berkat Ridho–Nya jualah sehingga Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2014-2018 Dinas Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2017 dapat kami susun.

Meskipun Renstra kami telah susun dari berbagai Sumber baik dari acuan kebijaksanaan dan strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial, Administrasi baik tingkat Pusat maupun Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, namun tetap menyesuaikan kebijaksanaan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Enrekang kami telah sadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Dan kepada semua pihak telah memberikan sumbangsinya baik tenaga, pikiran, dukungan moril maupun Spritual dalam menyusun Renstra ini kami dari seluruh jajaran Dinas Sosial mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Tuhan yang Maha Esa dapat membalas budi baiknya .

Enrekang, 2017

Kepala Dinas Sosial

Kab. Enrekang

Drs.YUNUS RAJUDDIN,MM

NIP: 19581231 199203 1 042

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistimatika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 15
  2. Sumber Daya SKPD 27
  3. Kinerja Pelayanan SKPD 31
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD

BAB III ISU–ISU STRATEGIS DINAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 41

Fungsi Pelayanan SKPD

* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 47

dan Wakil Kepala Daerah

* 1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota 51
  2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 51

Lingkungan Hidup Strategi

* 1. Penentuan Isu-isu Strategi 54

BAB IV VISI - MISI, TUJUAN DAN SASARAN STARTEGI DAN KEBIJAKAN

* 1. Visi dan Misi Dinas Sosial 56
  2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas sosial 61
  3. Strategis dan Kebijakan 65

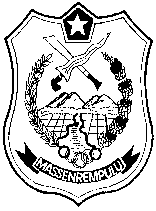
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 71

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA 80

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG

BAB VII PENUTUP 113



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS SOSIAL

*Jl. Jenderal Sudirman Nomor Telp. (0420) -21060 Enrekang*

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2014-2018

DINAS SOSIAL KABUPATEN ENREKANG

Tahun 2017